

8

HUBUNGAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL DENGAN BEBERAPA KEBIJAKAN SEKOLAH SMP/MTs DI INDONESIA TENGAH*

Triatmanto¹⁾, Ambar Pertiwiningrum²⁾, Buchori³⁾, Sukamta⁴⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pelaksanaan Ujian Nasional dengan kebijakan sekolah di SMP dan MTs. di Indonesia tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian *explanatory*. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret s.d. Agustus 2007, dengan subyek penelitian meliputi kepala sekolah, guru, siswa, orang tua dan masyarakat. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kuadran kualitas pendidikan (dengan pertimbangan faktor kualitas guru dan hasil UN tahun sebelumnya) di seluruh wilayah Indonesia tengah (Jawa, Bali, Kalimantan). Berdasarkan kuadran tersebut diperoleh 8 kabupaten/kota yaitu Kota Yogyakarta, Salatiga (Jawa Tengah), Batu, Madura (Jawa Timur), Sangata (Kaltim), Jabiren, Kahayan (Kalteng), dan Pontianak (Kalimantan Barat). Setiap kabupaten/kota diambil 6 sekolah berdasarkan kuadran dalam kabupaten/kota. Pengumpulan data dilakukan dengan, kuesioner, interview, *Focussed Groups Discussion* (FGD) dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa berbagai kebijakan sekolah dilakukan berdasarkan pemilahan mata pelajaran UN dan non-UN. Ada tiga pola kebijakan sekolah dalam pembelajaran SMP dan MTs, 1. Penambahan jam pelajaran mata pelajaran UN di luar jam sekolah, penambahan jam pelajaran UN dengan mengurangi jam pelajaran non-UN, dan melakukan keduanya. 2. Mata pelajaran UN memperoleh alokasi waktu sangat banyak dibanding dengan mata pelajaran non-UN, 3. Terdapat kebijakan pemerintah yang berbeda dalam pengadaan buku, yang terfokus pada buku mata pelajaran UN. Dari kebijakan tersebut menimbulkan akibat ketidakseimbangan pendapatan antara guru yang mengajar mata pelajaran UN dengan non-UN. Akibatnya semangat kerja guru mata pelajaran non-UN menurun/ rendah. Akibat lainnya adalah siswa menganggap bahwa UN menjadi satu-satunya penentu kelulusan, sehingga mata pelajaran non-UN disepelekan.

*Makalah disampaikan dalam Simposium Tahunan Pendidikan oleh PUSLITJAKNOV, tanggal 12-14 Agustus 2008 di Jakarta

1) Staf edukatif FMIPA UNY; 2) Staf edukatif FAPET UGM; 3) Staf edukatif FKIP UPY; 4) Staf edukatif FT UMY

LATAR BELAKANG MASALAH

Pemberlakuan Ujian Nasional (UN) di tingkat pendidikan dasar dan menengah telah membuat kontroversi yang luar biasa di kalangan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya tulisan di media masa tulis, tayangan di media televisi, maupun dalam media internet. Beragam komentar tentang penyelenggaraan ujian nasional telah disampaikan oleh berbagai pihak.

Dari seluruh komentar dan pendapat semuanya mengarah pada dua kutup yang berlawanan, meskipun adapula pendapat yang mencoba berada di kedua sisi, dengan segala argumentasinya. Pendapat pertama adalah pendapat yang tidak setuju dengan UN. Kelompok ini mendasarkan pada tiga alasan utama, yaitu 1. Setiap anak memiliki potensi masing-masing, tidak bisa hanya diukur dengan empat atau enam mata pelajaran saja, 2. Hasil belajar selama tiga tahun, tidak adil bila hanya ditentukan oleh hasil ujian yang beberapa jam saja. 3. Tidak setiap sekolah memiliki sumber daya fasilitas dan manusia yang seragam, sehingga tidak dapat diukur dengan ukuran yang seragam pula.

Pendapat yang setuju dengan pelaksanaan UN mempunyai tiga argumentasi utama, yaitu 1. Mutu pendidikan tidak dapat dibiarkan tanpa standar yang jelas sesuai dengan amanat undang-undang. 2. Penentuan batas kelulusan akan memacu sekolah dan siswa untuk meningkatkan dirinya. 3. Penyelenggaraan UN dapat menjadi salah tolak ukur keberhasilan pendidikan suatu sekolah atau daerah.

Beberapa pendapat yang mencoba berada diantara keduanya berargumentasi 1. Penyelenggaraan UN dapat dilakukan namun bukan sebagai penentu kelulusan. 2. Kelulusan siswa adalah hak setiap guru di sekolah masing-masing. 3. Standar kelulusan ditentukan oleh masing-masing wilayah, sesuai dengan tingkat perkembangan pendidikan di wilayah tersebut.

Terlepas dari semua pendapat tersebut, ternyata penyelenggaraan UN telah mendorong semua pihak yang berkaitan dengan UN menyikapinya

dengan cara masing-masing. Sekolah sebagai salah satu pihak yang secara langsung menyelenggarakan UN, diduga pula melakukan tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan UN. Semua kebijakan sekolah arahnya tentu meningkatkan tingkat kelulusan siswa dan capaian nilai UN.

Dari sisi motivasi, semua kebijakan tersebut merupakan upaya positif yang perlu didukung oleh semua pihak. Namun beberapa upaya sekolah untuk meningkatkan hasil UN, kadang ada yang melanggar aturan hukum dan bahkan bersifat kriminal. Penangkapan guru yang melakukan kecurangan di beberapa daerah oleh Densus 88 pada penyelenggaraan UN tahun 2008 semakin memperkuat dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan UN.

Penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan UN, meskipun telah melibatkan pihak Perguruan Tinggi dan LSM sebagai Pemantau Independen, ternyata masih terjadi. Namun itu semua baru mengungkap sebagian fakta di lapangan, khususnya pada saat penyelenggaraan UN. Padahal sebenarnya, penyelenggaraan UN hanyalah satu titik dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah secara keseluruhan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tulisan ini akan melihat bagaimana sekolah (SMP dan M.Ts) menanggapi pelaksanaan UN melalui kebijakan sekolah yang tertulis maupun tidak, dalam rangka meningkatkan hasil UN di sekolahnya.

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan-kebijakan sekolah yang berkaitan dengan penyelenggaraan UN.

KAJIAN PUSTAKA

1. Kompetensi Lulusan SMP DAN MTS

Pendidikan SMP dan MTs./SMPLB/Paket B bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar kompetensi lulusan setelah menyelesaikan pendidikan SMP DAN MTS mencakup:

- a. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja
- b. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri
- c. Menunjukkan sikap percaya diri
- d. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas
- e. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan social ekonomi dalam lingkup nasional
- f. Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif
- g. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif
- h. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya
- i. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari
- j. Mendeskripsi gejala alam dan sosial
- k. Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab
- l. Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- m. Menghargai karya seni dan budaya nasional
- n. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya

- o. Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang
- p. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun
- q. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat
- r. Menghargai adanya perbedaan pendapat
- s. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana
- t. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana
- u. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan menengah. (Standar Kompetensi Lulusan SMP/MTs)

2. Prinsip Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum SMP DAN MTS

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan pendidikan SMP dan MTs perlu dikembangkan kurikulum yang mampu menjamin pencapaian tujuan tersebut. Menurut Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP), kurikulum yang baik harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.

b. Beragam dan terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status social ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.

c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

e. Menyeluruh dan berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.

f. Belajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait pelaksanaan kurikulum, BSNP menentukan beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.
- b. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

- c. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral.
- d. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip *tut wuri handayani, ing madya mangun karsa, ing ngarsa sung tulada* (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan).
- e. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip *alam takambang jadi guru* (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan).
- f. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
- g. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan.

Guru merupakan pusat dari peningkatan kualitas pembelajaran, namun tidak dapat dilepaskan sendiri bertanggungjawab untuk perubahan itu. Guru memerlukan bekerja dalam kesejawatan, organisasi dan kebijakan terkait, yang mendukung pembelajaran yang baik. (*National Standards of Science Education.*)

Penelitian Sanders & Rivers, dan Vanusek & Rivkin, di Alabama, Tennessee dan Texas, USA pada tahun 2002 menyimpulkan bahwa guru yang berkualitas mampu meningkatkan prestasi lebih dari 50%-70% pada skala nilai 100, dibanding siswa yang diajar guru yang tidak berkualitas.

Menurut *National Broads for Professional Teaching Standards* (BPTS) Guru yang berkualitas salah satunya harus menguasai materi mata pelajarannya, menguasai strategi pembelajaran, memahami karakter, perkembangan, dan keinginan siswa, mampu berpikir sistematis dan logis, dapat bekerjasama dengan sejawat, dan melakukan evaluasi pembelajarannya secara mandiri dan efektif. ([http://www.nbts.org/standards/know do/intro.html](http://www.nbts.org/standards/know%20do/intro.html))

Di Indonesia, menurut Undang-Undang No 14 th 2005 tentang Guru dan Dosen guru profesional dituntut memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Kompetensi pedagogik, guru harus dapat memahami peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik. Guru Indonesia dianggap mempunyai kompetensi kepribadian sebagai pendidik jika memiliki kepribadian yang mantab dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berahlak mulia. Guru memiliki kompetensi profesional jika menguasai bidang studi secara luas dan mendalam. Guru dinilai memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik jika mampu berkomunikasi secara efektif, bergaul secara efektif, dan bekerjasama dengan sejawat, orangtua, dan masyarakat.

Charlotte Danielson (1996) mengemukakan bahwa kualitas pembelajaran dapat dilihat dari empat domain, yaitu, perencanaan dan persiapan, keadaan lingkungan kelas, instruksi/perintah tertulis maupun lisan, profesionalitas dan tanggung jawab. Perencanaan dan persiapan dapat dilihat dari pengetahuannya tentang teori pedagogik, pemahaman karakter siswa berdasarkan umur, minat, latar belakang sosial dan kemampuan awal siswa. Selain itu guru juga harus mampu mendisain pembelajaran yang cocok dengan siswa, aktifitas yang sesuai, pemilihan

media dan pendekatan, menentukan kriteria dan standard, serta menggunakan assesmen dalam perencanaan.

Untuk mengembangkan guru agar menjadi professional diperlukan pendidikan yang sesuai dan memadai, pelatihan pendidikan yang sesuai, ujian dalam kemampuan dasar dan pengetahuan pembelajaran (Linda Darling-Hammond, 2000.) Bahkan di Alabama, untuk mengejar perbaikan kualitas pendidikan dilakukan langkah-langkah yang berani dengan melakukan rekrutmen tenaga pendidikan yang berpotensi tinggi, seleksi ketat terhadap calon guru, menetapkan standar dan kriteria yang tinggi bagi calon pendidik, mendukung program-program bagi guru baru, dan yang terpenting memberi gaji yang tinggi bagi guru yang profesional. Di Alabama, gaji minimum guru profesional, dengan pendidikan sarjana muda (bachelor) 0 tahun 29,538 USD (*Alabama State Departmen of Education* dalam Hirsch.2004)

Untuk mengembangkan profesionalitas guru tidak cukup dengan pendidikan sarjana saja. Diperlukan kursus dan pelatihan bagi guru untuk terus menjaga dan mengembangkan kemampuan penguasaan materi maupun teknik-teknik mengajar. Selain itu, guru juga perlu dievaluasi secara komprehensif dan periodik. Kehadiran kepala sekolah dengan kepemimpinan yang kuat, untuk menciptakan kondisi sekolah yang kondusif, sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat diperlukan untuk menciptakan kultur lingkungan sekolah bagi kerja siswa, melakukan evaluasi berdasarkan data dan peyelidikan, melibatkan guru dalam pengambilan keputusan, mengupayakan keberlanjutan pengembangan profesionalitas guru. (Teaching Quality, 2004)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebagian penelitian dari Puslitjaknov Balibang Depdiknas tahun 2007, mengenai Kualitas Pembelajaran Mata Pelajaran UN Dan Non-UN Di SMP Dan MTs di Indonesia. Penelitian ini

merupakan penelitian *explanatory*. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret s.d. Agustus 2007, dengan subyek penelitian meliputi kepala sekolah, guru, siswa, orang tua dan masyarakat. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kuadran kualitas pendidikan (dengan pertimbangan faktor kualitas guru dan hasil UN tahun sebelumnya) di seluruh wilayah Indonesia tengah (Jawa, Bali, Kalimantan). Berdasarkan kuadran tersebut diperoleh 8 kabupaten/kota yaitu Kota Yogyakarta (DIY), Salatiga (Jawa Tengah), Batu, Madura (Jawa Timur), Sangata (Kaltim), Jabiren, Kahayan (Kalteng), dan Pontianak (Kalimantan Barat). Setiap kabupaten diambil 6 sekolah berdasarkan kuadran dalam kabupaten. Pengumpulan data dilakukan dengan, kuesioner, interview, *Focussed Groups Discussion* (FGD) dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kuantitatif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan *Focussed Group Discussion* yang dilakukan baik terhadap guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua siswa, dapat direkap sebagai berikut:

Tabel 1. Rangkuman Hasil FGD dengan Siswa, Guru, dan Kepala Sekolah

No	Ranah	Indikasi	Sumber data
1	Manajemen sekolah	Diskriminasi waktu pembelajaran Mata pelajaran UN dan Non UN (Les, Latihan soal,)	S, G, KS
2		tambahan jam pelajaran MP UN tambah guru MP UN	Ks
3		Pengurangan jam pel MP non UN	Ks, G, S
4		Diskriminasi alokasi dana untuk buku	KS, G,
5		Diskriminasi alokasi dana /insentif guru	KS, G
6		Dana try out MP UN	Ks
7		Try out dengan Bimbel	Ks, G, S
8	Perilaku guru	Pembelajaran dengan drill soal	S, G

9	Tekanan KS	Tekanan KS terhadap Guru (Sekolah menentukan target rerata NEM)	KS, G
10	Pengawasan UN	Pengawas UN tidak menjalankan tugasnya dengan baik (Membawa alat komunikasi ke kelas, bicara sendiri sesama pengawas, baca koran/buku, tidur)	S
11		Pengawas UN tidak menjalankan tugasnya dengan baik (siswa tidak diperiksa)	S
12		Penyegelan amplop lembar jawaban tidak dilakukan di ruang ujian.	G
13	Tekanan Ortu	Sekolah membentuk "tim sukses"	G.

Keterangan :

S : siswa

G: guru

KS: kepala sekolah

Dari hasil FGD tersebut, di tambah dengan penelusuran dokumen, diketahui bahwa sekolah telah melaksanakan beberapa kebijakan berkaitan dengan diselenggarakannya UN. Kebijakan-kebijakan itu adalah :

1. Kebijakan sekolah dalam alokasi sumberdaya fasilitas

Kebijakan sekolah dalam alokasi sumberdaya fasilitas sekolah tidak berbeda untuk mata pelajaran UN maupun non-UN. Pemanfaatan ruang kelas, laboratorium IPA, ruang komputer, media pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran. Hampir semua sekolah mempunyai lab IPA yang memadai, meskipun IPA bukan termasuk mata pelajaran yang di UN-kan.

2. Kebijakan Sekolah dalam Alokasi dana

a). Alokasi dana BOS buku

Dari FGD dan penelusuran dokumen, diketahui bahwa seluruh dana BOS buku dialokasikan untuk membeli buku mata pelajaran UN. Kebijakan itu diambil karena ada kebijakan dari departemen pendidikan yang menerbitkan petunjuk teknis pengadaan buku pelajaran melalui dana BOS dengan rekomendasi buku-buku mata pelajaran UN saja.

Dari penelusuran dokumen, diketahui, dana BOS memang hanya mencukupi sebagian saja dari kebutuhan buku pelajaran suatu sekolah. Alasan inilah yang menyebabkan sekolah juga memprioritaskan pengadaan buku untuk mata pelajaran UN saja.

b). Kebijakan sekolah dalam memberikan insentif kepada guru

Pemberian insentif kepada guru berkait dengan adanya jam pelajaran tambahan untuk mata pelajaran tertentu. Sebagian besar sekolah hanya memberi tambahan jam pelajaran untuk mata pelajaran UN saja. Jam pelajaran tambahan diberikan kepada mata pelajaran UN minimal selama 2 jam perminggu dan maksimal 4 jam per minggu. Setiap guru yang memberi jam pelajaran tambahan, mendapat insentif rata-rata Rp.10.000,00.(sepuluh ribu rupiah) per jam per kelas.

Tabel 2: Mata pelajaran yang mendapat jam pelajaran tambahan dan besarnya insentif per mata pelajaran perjam pertemuan.

No	Mata Pelajaran	Asal guru		Jml jam Pljrn/ minggu	Biaya tiap jam pelajaran (Rp)
		sendiri	Dari luar		
1.	Bahasa Inggris	V	-	2 / 4	10.000
2.	Matematika	V	-	2 / 4	10.000
3.	Bhs Indonesia	V	-	2	10.000
4.	Agama	-	-	-	-
5.	PKn	-	-	-	-
6.	IPS	-	-	-	-
7.	IPA	-	-	-	-
8.	Penjaskes	-	-	-	-
9.	Seni Budaya	-	-	-	-
10.	Tekn. Informasi	-	-	-	-

1. Kebijakan sekolah dan alokasi waktu

- a. Pengurangan jam mata pelajaran non-UN di sebagian besar sekolah untuk menambah jam belajar mata pelajaran UN.

Setiap mata pelajaran dalam kurikulum telah diberikan alokasi waktunya, namun kebanyakan sekolah melakukan penambahan jam pelajaran untuk mata pelajaran tertentu (matapelajaran UN dan sebagian non UN).

Adapun komposisi alokasi waktu jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran, tambahan jam pelajaran, dan selisih antara jam pelajaran dalam kurikulum dengan jam pelaksanaan di sekolah disajikan pada Tabel 3

Tab 3. Alokasi waktu menurut kurikulum dan sekolah untuk setiap mata pelajaran

No	Mata Pelajaran	Jml jam dalam kurikulum	Jam yang dilaksanakan	Jml jam tambahan
1.	Bahasa Inggris	4	6-8	2-4
2.	Matematika	4	6-8	2-4
3.	Bhs Indonesia	4	6	2
4.	PKn	2	2	0
5.	IPS	4	4	0
6.	IPA	4	4	0
7.	Agama	2	2	0
8.	Penjaskes	2	2	0
9.	Seni Budaya	2	2	0
10.	Tekn. Informasi	2	2	0
11.	Mulok	2	2	0

Dari Tabel 4.2 di atas tampak bahwa mata pelajaran Bahasa Indonesia yang secara kurikuler mendapat alokasi waktu 4 jam pelajaran, memperoleh alokasi waktu oleh sekolah selama 6 jam

pelajaran. Hal ini berarti, pelajaran Bahasa Indonesia mendapat tambahan jam pelajaran sebanyak 2 jam perminggu. Mata pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris, yang seharusnya alokasi waktu perminggu 4 jam pelajaran, oleh sekolah dialokasikan waktu antara 6 sampai dengan 8 jam pelajaran perminggu. Hal ini berarti mata pelajaran tersebut mendapat tambahan jam pelajaran sebanyak 2 sampai dengan 4 jam pelajaran perminggu.

b. Alternatif penambahan waktu mata pelajaran.

Ditemukan empat cara penambahan waktu untuk mata pelajaran UN, yaitu (i) mengurangi alokasi waktu beberapa mata pelajaran non-UN, atau bahkan (ii) meniadakan pembelajaran beberapa mata pelajaran non-UN, atau (iii) mengadakan les, atau (iv) mengadakan latihan ujian mata pelajaran UN (di luar jam pelajaran).

Dari FGD dan penelusuran dokumen, waktu pembelajaran mata pelajaran non-UN yang dikurangi antara lain: muatan lokal, seni budaya non muatan lokal dan Kerajinan Tangan dan Kesenian (KTK). Sekolah juga meniadakan pembelajaran mata pelajaran non-UN untuk jangka waktu tertentu. Beberapa sekolah ada yang meniadakan pembelajaran mata pelajaran non UN sejak 2 minggu sebelum UN, ada yang mulai semester VI. Peniadaan pembelajaran mata pelajaran tertentu dilakukan secara diam-diam, artinya pada jadwal pelajaran resmi sekolah, jadwal semua pelajaran tetap ada dan seolah-olah pembelajaran semua mata pelajaran tetap berlangsung hingga akhir semester.

Selain memperoleh penambahan jam pelajaran secara reguler, mata pelajaran UN juga memperoleh penambahan waktu belajar melalui les, yang dilaksanakan paling tidak sekali seminggu selama 2 jam untuk setiap mata pelajaran. Beberapa sekolah juga mengadakan tambahan waktu belajar dengan melaksanakan latihan ujian mata pelajaran UN. Kegiatan itu dilakukan paling tidak 2 kali dalam satu semester untuk

masing-masing mata pelajaran UN selama 2 jam. Untuk sekolah-sekolah yang bekerjasama dengan lembaga bimbingan belajar, tambahan jam belajar mata pelajaran UN diselenggarakan setiap minggu selama 2 jam, untuk membahas soal-soal ujian.

- c. Pengaturan jadwal: (i) Mata pelajaran UN dijadwalkan pagi hari, (ii) Jam pelajaran mata pelajaran non-UN digeser untuk jam tambahan (les) mata pelajaran UN

Perbedaan alokasi waktu jam pelajaran bukan saja dilakukan dengan penambahan mata pelajaran tertentu dan pengurangan jam pelajaran mata pelajaran lainnya, tetapi juga dilakukan dengan prioritas pemanfaatan waktu efektif untuk mata pelajaran UN. Mata pelajaran UN dijadwalkan pagi hari, menggunakan jam belajar prima (pagi hari ketika anak belum lelah) untuk mata pelajaran UN dengan menggeser jadwal pembelajaran mata pelajaran non-UN (Olah raga & Muatan lokal) dari pagi menjadi sore hari. Pada kasus lain bahkan mata pelajaran non-UN yang semula pagi digeser juga untuk jam tambahan (les) mata pelajaran UN. Akibatnya banyak siswa tidak mengikuti mata pelajaran yang digeser ke sore hari tersebut karena kelelahan.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa, berkaitan dengan penyelenggaraan UN sekolah melakukan kebijakan yang sangat menguntungkan mata pelajaran UN dan mengesampingkan pelajaran non-UN.

Beberapa kebijakan sekolah yang berkaitan dengan penyelenggaraan UN terutama adalah dalam alokasi dana dan waktu, yang sebagian besar diperuntukkan untuk mata pelajaran UN.

PUSTAKA

- Abdul Manan A. 1998. "Langkah-langkah Strategis ke Arah Pemecahan Masalah Peningkatan Mutu SMP", dalam *Kajian Pendidikan dan Kebudayaan No. 014/IV/September 1998*. Jakarta: Balitbang Depdikbud.
- Babari, J. dan Onny S. Prijono. 1996. "Pendidikan sebagai Sarana Pemberdayaan", dalam Prijono, Onny S. dan A.M.W. Pranarka. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Danielson, Charlotte .1996. *Enhancing Professional Practice : A Framework for Teaching*. Alexandria
- Darling-Hammond, Linda.2000. *Teacher Quality and Student Achievement:A Review of state policy*. *Education Policy Analysis Archives* 8(1). <http://olam.ed.asu.edu/epaa/v8n1/>
- Depdiknas, (2006). *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: PP nomor 19 tahun 2005
- Hanusek E, Kain & Rivkin. 2001. *Eight Fact about Teacher Pay and Teacher Retention in Texas Public Schools*. *Teaching Quality*.
- Indra Djati Sidi. 2002. *Menuju Masyarakat Pembelajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Jakarta:Paramadina dan Logos Wacana Ilmu.
- J Supranto.200. *Teknik Sapling Untuk Survey dan Eksperimen*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Keputusan BSNP No. 550/BSNP/1/01/7 tentang perubahan POS no. 58 Mata Pelajaran yang di UN-kan.
- PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006
- Permen Depdiknas Nomor 2 tahun 2007, dan nomor 5 tahun 2007, tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007
- Scheaffer, R.L; Mendenhall, W; and Ott, L.1990.: *243 Elementary Survey Sampling*. PWS-Kent Publishing Company: Boston

Suyanto dan Djihad Hisyam. 2000. *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: Adi Cita.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005. Tentang Sertifikasi Guru dan Dosen.

Wuraji.2006. *Panduan Penelitian Survei*. Lembaga Penelitian UNY : Yogyakarta



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN DAN INOVASI PENDIDIKAN**

Depdiknas, Gedung A, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 12161, Kotak Pos 4114
Telp. (021)573-6365, Faks. (021)573-1664, e-mail: puslitjknov@yahoo.com

Nomer : 1237.1/G2/PL/2007
Lamp. : -
Hal : Pengumpulan Data

25 Mei 2007

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan
Kab/Kota YOGYAKARTA

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa salah satu kegiatan Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas dalam tahun anggaran 2007 adalah melakukan Pengkajian Pembelajaran Mata Pelajaran UN dan non-UN di SMP/MTs. Bersama ini kami sampaikan bahwa daerah Saudara terpilih menjadi salah satu sampel sekolah. Sehubungan dengan hal itu, kami bermaksud akan melakukan pengumpulan data mengenai proses pembelajaran mata pelajaran tersebut pada beberapa SMP/MTs di wilayah Saudara.

Pengumpulan data tersebut akan dilaksanakan pada waktu dan oleh petugas berikut.

Nama : Priatnanto,MSi, Irwan N.K,MSi, Dra. Hewi Murdaningsih
Waktu : 28 Mei s.d. 20 Juni 2007
Tempat : SMP dan MTs di Kota Yogyakarta

Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh petugas tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Pusat,

Agung Purwadi, M.Eng
Telp. 130 885 524

Tembusan.
Kepala Balitbang Depdiknas, sebagai laporan